



## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SAT LANTAS POLRES TABALONG TAHUN 2018**

---

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberadaannya sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik.

Dalam era reformasi yang sedang bergulir saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terus berusaha dalam mewujudkan postur Polri yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum. Kepolisian Resort Tabalong bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang senantiasa terus berupaya mendukung dan mengawasi agar reformasi dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk mewujudkan harapan tersebut Kepolisian Resort Tabalong telah melaksanakan reformasi di dalam pengelolaan organisasi baik dari aspek akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan Negara, dimana ketentuan tersebut seperti yang telah tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah mengamanatkan agar setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban.

pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja negara / anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam penyelenggaraan Kepolisian Resort Tabalong yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk pertanggungjawaban terkait pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata secara periodik melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep / 515 / IX / 2012 tentang pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menindaklanjuti hal tersebut, Kepolisian Resort Tabalong membuat laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbarui kembali dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort adalah sebagai berikut :

### **1. Tugas Pokok Sat Lantas Polres Tabalong**

Sat Lantas Polres Tabalong merupakan unsur pelaksana tugas Pokok yang berada di bawah Kapolres Tabalong yang bertugas melaksanakan Turjawali Lalu Lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas. .

## 2. Fungsi Sat Lantas Polres Tabalong

Dalam mengemban tugas tersebut, Sat Lantas Polres Tabalong menyelenggarakan fungsi:

- a) Pembinaan lalu lintas Kepolisian.
- b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmas Lantas dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas..
- c) Pelaksanaan Operasi Kepolisian dibidang Lalu lintas dalam rangka penegakan hokum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaranm lalu lintas..
- d) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi..
- e) Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas
- f) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
- g) Perawatan dan pemeliharaan perawatan dan kendaraan.

## C. Struktur Organisasi Polres Tabalong

Untuk mengemban tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Tabalong sebagai berikut:

1. Susunan organisasi Sat Lantas Polres terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan :
  - a) Kasat Lantas
- b. Unsur pembantu pimpinan/pelayanan :
  - a) Urbinopsnal
  - b) Urmintu
  - c) Unit Turjawali
  - d) Unit Dikyasa
  - e) Unit Regident
  - f) Unit Laka

#### **D. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sat Lantas Polres Tabalong Tahun 2018 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian.

BAB II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, memuat tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja.

BAB III : Akuntabilitas Keuangan, memuat tentang Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Indikator kinerja Utama, Indikator Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : Penutup, memuat tentang Kesimpulan dan Saran Tindak Lanjut.

Lampiran :

1. Pengukuran Kegiatan Kinerja (PKK).
2. Struktur Organisasi Sat Lantas Polres Tabalong.
3. Perjanjian Kinerja Polres Tabalong.
4. Piagam Penghargaan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategi Sat Lantas Polres Tabalong**

Berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Secara substantif Rencana Strategis Polres Tabalong memuat visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai, sasaran prioritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

##### **a. Visi dan Misi**

###### **1. Visi Polda Kalsel**

“Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskan semangat gotong royong di Polda Kalsel “

###### **2. Misi Polda Kalsel**

- a) Mewujudkan pemulihan dan kepercayaan public ( trust building ) diwilayah Polda Kalsel melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan;
- b) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri di wilayah Polda Kalsel yang professional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi – sendi hak asasi manusia;
- c) Meningkatkan motivasi dan kesejahteraan personil Polri di Polda Kalsel ( well motivated dan welfare );
- d) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif;
- e) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif;

- f) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;
- g) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- h) Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban dikawasan perairan laut, sungai dan danau;
- i) Menerapkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintergrasi secara menyeluruh guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri di wilayah Polda Kalsel;
- j) Mewujudkan anggota Polri di wilayah Polda Kalsel yang kompeten dan dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi;
- k) Mewujudkan intelijen kepolisian yang professional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan di Polda Kalsel.

**1). Visi Polres Tabalong.**

“Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskan semangat gotong royong di Polres Tabalong“

**2) Misi Polres Tabalong.**

- a) Mewujudkan pemulihan dan kepercayaan public ( trust building ) di Polres Tabalong melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan;
- b) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri di Polres Tabalong yang professional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi – sendi hak asasi manusia;

- c) Meningkatkan motivasi dan kesejahteraan personil Polri di Polres Tabalong ( well motivated dan welfare );
- d) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat akurat dan efektif;
- e) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif;
- f) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;
- g) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- h) Menerapkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintergrasi secara menyeluruh guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri di Polres Tabalong;
- i) Mewujudkan anggota Polri di Polres Tabalong yang kompeten dan dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi;
- j) Mewujudkan intelijen kepolisian yang professional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan di Polres Tabalong.

## **b. Tujuan**

### **1. Tujuan Polda Kalsel**

1. Terwujudnya organisasi Polri Polda Kalsel dengan tata kelola yang baik dan bersih ( Good and Clean Governmance);
2. Terwujudnya polri diwilayah Polda Kalsel yang professional dan kompeten, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat;

3. Terwujudnya reformasi birokrasi Polri di Polda Kalsel;
4. Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif terhadap semua aspek kehidupan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat;
5. Terwujudnya situasi dan kondisi kamseltibcarlantas yang aman, tertib dan terkendali sehingga terjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
6. Terwujudnya pelayanan prima kepolisian di Polda Kalsel yang cepat, tepat, akurat, tidak diskriminatif, akuntabel, serta melakukan tindakan yang proaktif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
7. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
8. Terbangun dan terjalin hubungan kerjasama yang harmonis, koordinatif, integritas dan sinergi antar instansi / lembaga dan masyarakat, secara bersama – sama menciptakan situasi yang kondusif dan menjaga serta memelihara kamtibmas.

## **2. Tujuan Polres Tabalong**

1. Terwujudnya organisasi Polri Polres Tabalong dengan tata kelola yang baik dan bersih (Good and Clean Governance);
2. Terwujudnya polri di Polres Tabalong yang professional dan kompeten, bermoral, modern, unggul dan dipercaya masyarakat;
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Polri di Polres Tabalong;
4. Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif terhadap semua aspek kehidupan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat;



5. Terwujudnya situasi dan kondisi kamseltibcarlantas yang aman, tertib dan terkendali sehingga terjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
6. Terwujudnya pelayanan prima kepolisian di Polres Tabalong yang cepat, tepat, akurat, tidak diskriminatif, akuntabel, serta melakukan tindakan yang proaktif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
7. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
8. Terbangun dan terjalin hubungan kerjasama yang harmonis, koordinatif, integritas dan sinergi antar instansi / lembaga dan masyarakat, secara bersama – sama menciptakan situasi yang kondusif dan menjaga serta memelihara kamtibmas.

### **c. Sasaran Strategis**

#### 1.. Sasaran Strategis Polda Kalsel

- a) Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- b) Terbangunnya postur personel Polda Kalsel yang professional, kompeten, bermoral, modern;
- c) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri Polda Kalsel melalui perubahan mind set dan culture set;
- d) Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan kamtibmas;
- e) Terwujudnya keamanan dan situasi kondusif di wilayah perairan dari kejahatan perairan;
- f) Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas melalui upaya preemtif dan preventif;

- g) Meningkatkan peran Babinkamtibmas sebagai upaya terwujudnya kehadiran Polisi ditengah – tengah masyarakat;
- h) Terwujudnya keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- i) Terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Polda Kalsel;
- j) Terwujudnya penegakkan hukum;
- k) Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat dan sinergi polisional dengan instansi / lembaga terkait.

## 2. Sasaran Strategis Polres Tabalong.

- a) Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- b) Terbangunnya postur personel Polres Tabalong yang profesional, kompeten, bermoral, modern;
- c) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri Polres Tabalong melalui perubahan *mind set* dan *culture set*;
- d) Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan kamtibmas;
- e) Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas melalui upaya preemtif dan preventif;
- f) Meningkatkan peran Bhabinkamtimas sebagai upaya terwujudnya kehadiran Polisi ditengah-tengah masyarakat;
- g) Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas;
- h) Terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Polres Tabalong;
- i) Terwujudnya penegakkan hukum;

- j) Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat dan sinergi polisional dengan instansi/ Lembaga terkait.

Dengan **Rencana Capaian Target Sasaran Strategi** sebagai berikut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.	a. Prosentase realisasi anggaran Sat Lantas Polres Tabalong.	100 %	100%
2	Terbangunnya postur personel Polres Tabalong yang profesional, kompeten, bermoral, modern.	a. Prosentase jumlah personel Polres Tabalong yang memiliki kompetensi; b. Prosentase penurunan pelanggaran disiplin; c. Prosentase penurunan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Polres Tabalong.	7 % 5 % 4 %	4% 30% 50%
3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri Polres Tabalong melalui perubahan <i>mind set</i> dan <i>culture set</i>	a. Prosentase meningkatnya motivasi kerja anggota melalui pemberian reward;	3 %	100%
4	Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan kamtibmas.	a. Prosentase potensi gangguan kriminalitas tidak menjadi gangguan nyata; b. Prosentase unjuk rasa tidak anarkis.	8 % 2 %	2% 25%

5	Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas melalui upaya preemtif dan preventif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosentase peningkatan kesadaran hukum masyarakat;</li> <li>b. Prosentase peningkatan kepedulian masyarakat akan pengamanan Swakarsa;</li> <li>c. Prosentase penurunan gangguan kamtibmas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 %</li> <li>15 %</li> <li>6 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>37%</li> <li>15%</li> <li>20%</li> </ul>
6	Meningkatkan peran Bhabinkamtimas sebagai upaya terwujudnya kehadiran Polisi ditengah-tengah masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosentase meningkatnya kemitraan antara Polri dan masyarakat;</li> <li>b. Prosentase penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan Bhabinkamtibmas / petugas Polmas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 %</li> <li>5 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20%</li> <li>3%</li> </ul>
7	Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosentase penurunan pelanggaran lalulintas;</li> <li>b. Prosentase penurunan angka kematian korban laka lant;</li> <li>c. Prosentase penurunan kecelakaan lalulintas.</li> <li>d. Prosentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 %</li> <li>5 %</li> <li>2 %</li> <li>10 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>69%</li> <li>4%</li> <li>1%</li> <li>7%</li> </ul>
8.	Terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Polres Tabalong	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prosentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan (SIM, STNK dan TNKB);</li> <li>b. Prosentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKCK;</li> <li>c. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat atas pelanggaran anggota Polres Tabalong;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 %</li> <li>9 %</li> <li>2 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12%</li> <li>10%</li> <li>2%</li> </ul>

		d. Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh Polres Tabalong;	2 %	2%
9	Terwujudnya penegakkan hukum	a. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana umum sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21);	9 %	7%
		b. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana khusus sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21);	9 %	7%
		c. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21);	8 %	5%
		d. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana Korupsi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21);	5 %	3%
10	Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat dan sinergi polisional dengan instansi/ Lembaga terkait.	Prosentase MOU Polri dengan Instansi/ Lembaga terkait.	8 %	100%

## B. Perjanjian Kinerja Polres Tabalong

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kapolri No.

Pol. : Skep / 102 / II / 2006 tanggal 9 Februari 2006 tentang Buku Pedoman Perjanjian Kinerja Tingkat Satker di lingkungan Polri. Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*).

Polres Tabalong pada tanggal 19 Juli 2017 telah membuat revisi Perjanjian Kinerja tahun 2017 di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Kapolda Kalsel, kegiatan yang disusun dalam Penetapan Kinerja adalah kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Polres Tabalong, penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017.

Perjanjian kinerja Polres Tabalong tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.	a. Nilai akuntabilitas kinerja dari Itwasda Polda Kalsel;  b. Prosentase realisasi anggaran Polres Tabalong.	CC  90 %
2	Terbangunnya postur personel Polres Tabalong yang profesional, kompeten, bermoral, modern.	a. Prosentase jumlah personel Polres Tabalong yang memiliki kompetensi;  b. Prosentase penurunan pelanggaran disiplin;  c Prosentase penurunan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Polres Tabalong.	7 %  5 %  4 %

3	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri Polres Tabalong melalui perubahan <i>mind set</i> dan <i>culture set</i>	a. Prosentase meningkatnya motivasi kerja anggota melalui pemberian reward;	3 %
4	Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan kamtibmas.	a. Prosentase potensi gangguan kriminalitas tidak menjadi gangguan nyata;  b. Prosentase unjuk rasa tidak anarkis.	8 %  2 %
5	Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas melalui upaya preemtif dan preventif	a. Prosentase peningkatan kesadaran hukum masyarakat;  b. Prosentase peningkatan kepedulian masyarakat akan pengamanan Swakarsa;  c. Prosentase penurunan gangguan kamtibmas.	10 %  15 %  6 %
6	Meningkatkan peran Bhabinkamtibas sebagai upaya terwujudnya kehadiran Polisi ditengah-tengah masyarakat	b. Prosentase meningkatnya kemitraan antara Polri dan masyarakat;  b. Prosentase penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan Bhabinkamtibas / petugas Polmas	6 %  5 %
7	Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas	a. Prosentase penurunan pelanggaran lalulintas;  b. Prosentase penurunan angka kematian korban laka lantas;  c. Prosentase penurunan kecelakaan lalulintas.	15 %  5 %  2 %

		d. Prosentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas	10 %
8.	Terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Polres Tabalong	<p>a. Prosentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan (SIM, STNK dan TNKB);</p> <p>b. Prosentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKCK;</p> <p>c. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat atas pelanggaran anggota Polres Tabalong;</p> <p>d. Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh Polres Tabalong;</p>	<p>10 %</p> <p>9 %</p> <p>2 %</p> <p>2 %</p>
9	Terwujudnya penegakkan hukum	<p>a. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana umum sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21);</p> <p>b. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana khusus sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21);</p> <p>c. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21);</p> <p>d. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana Korupsi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21);</p>	<p>9 %</p> <p>9 %</p> <p>8 %</p> <p>5 %</p>
10	Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat dan sinergi polisional dengan instansi/ Lembaga terkait.	Prosentase MOU Polri dengan Instansi/ Lembaga terkait.	8 %



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Tabalong TA. 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam uraian sebagai berikut :

#### **A. Pengukuran Capaian Kinerja**

Secara umum dilingkungan Polres Tabalong terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, akan tetapi masih ada beberapa pencapaian sasaran strategis yang belum optimal dalam TA. 2018. Polres Tabalong dalam mewujudkan pencapaian sasaran strategis maupun target indikator yang belum berhasil, telah melakukan beberapa analisa dan evaluasi sebagai bahan umpan balik (*feedback*) dalam rangka peningkatan capaian kinerja di masa yang akan datang.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Tabalong TA. 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada lampiran Tabel 1 tentang Pengukuran Kinerja (PK) Polres Tabalong TA. 2018.

#### **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam suatu instansi pemerintah khususnya Polres Tabalong terdapat banyak indikator kinerja sasaran dan tingkat capaian kinerja yang dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis. Polres Tabalong telah menetapkan Keputusan Kapolres Tabalong Nomor: Kep / 02 / VI / 2017 tanggal 6 Juni 2017 sebagai Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama Renstra Polres Tabalong Tahun 2015 - 2018, maka Polres Tabalong telah menyusun indikator kinerja utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan secara menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran Polres Tabalong.

Capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara memperbandingkan antara rencana capaian kinerja ( target ) dengan realisasi capaian kinerja pada program Polres Tabalong T.A. 2018 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Tabel pengukuran kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.	a. Nilai akuntabilitas kinerja dari Itwasda Polda Kalsel;	CC	B	
	b. Prosentase realisasi anggaran Polres Tabalong.	90%	98,48%	
2. Terbangunnya postur personel Polres Tabalong yang profesional, kompeten, bermoral, modern.	a. Prosentase jumlah personel Polres Tabalong yang memiliki kompetensi;	7%	4%	
	b. Prosentase penurunan pelanggaran disiplin;	5%	30%	
	c. Prosentase penurunan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Polres Tabalong.	4%	50%	
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Polri Polres Tabalong melalui perubahan <i>mind set</i> dan <i>culture set</i>	a. Prosentase meningkatnya motivasi kerja anggota melalui pemberian reward;	3%	100%	
4. Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif terbebas dari gangguan kamtibmas.	a. Prosentase potensi gangguan kriminalitas tidak menjadi gangguan nyata.	8%	2%	
	b. Prosentase unjuk rasa tidak anarkis.	2%	25%	
5. Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas melalui	a. Prosentase peningkatan kesadaran hukum masyarakat.	10%	37%	

<p>upaya preemtif dan preventif.</p>	<p>b. Prosentase peningkatan kepedulian masyarakat akan pengamanan swakarsa.</p>	<p>15%</p>	<p>15%</p>	
<p>6. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas sebagai upaya terwujudnya kehadiran Polisi ditengah – tengah masyarakat.</p>	<p>c. Prosentase penurunan gangguan kamtibmas.</p>	<p>6%</p>	<p>20%</p>	
	<p>a. Prosentase meningkatnya kemitraan antara Polri dan Masyarakat.</p>	<p>6%</p>	<p>20%</p>	
<p>7. Terwujudnya keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas.</p>	<p>b. Prosentase penyelesaian permasalahan sosial yang dilakukan Bhabinkamtibmas / petugas Polmas.</p>	<p>5%</p>	<p>3%</p>	
	<p>a. Prosentase penurunan pelanggaran lalu lintas.</p>	<p>15%</p>	<p>69%</p>	
	<p>b. Prosentase penurunan angka kematian korban laka lintas.</p>	<p>5%</p>	<p>4%</p>	
<p>8. Terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Polres Tabalong.</p>	<p>c. Prosentase penurunan kecelakaan lalu lintas.</p>	<p>2%</p>	<p>1%</p>	
	<p>d. Prosentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.</p>	<p>10%</p>	<p>7%</p>	
	<p>a. Prosentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ( SIM, STNK dan TNKB ).</p>	<p>10%</p>	<p>12%</p>	
	<p>b. Prosentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SKCK.</p>	<p>9%</p>	<p>10%</p>	
	<p>c. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat</p>	<p>2%</p>	<p>2%</p>	

	atas pelanggaran anggota Polres Tabalong.			
9. Terwujudnya penegakkan hukum	d. Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat oleh Polres Tabalong.	2%	2%	
	a. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana umum sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21).	9%	7%	
	b. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana khusus sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21).	9%	7%	
	c. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21).	8%	5%	
	d. Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana korupsi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21).	5%	3%	
10. Terwujudnya kemitraan dengan masyarakat dan sinergi polisional dengan instansi / lembaga terkait.	a. Prosentase MOU Polri dengan instansi / lembaga terkait.	8%	100%	

### C. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja setiap sasaran, perbandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

1. Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, laporan, pelayanan internal yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara mabas dan wilayah.

a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Nilai akuntabilitas kinerja dari Itwasda Polda Kalsel**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Nilai akuntabilitas kinerja dari Itwasda Polda Kalsel	CC	B	B

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Nilai akuntabilitas kinerja dari Itwasda Polda Kalsel di Polres Tabalong mengalami kenaikan di tahun 2018 mendapatkan penilaian **B**, dibandingkan dengan Tahun 2017 mendapat penilaian **CC**.

**Tabel 2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Prosentase realisasi anggaran Polres Tabalong**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Prosentase realisasi anggaran Polres Tabalong.	90 %	98,48 %	100%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Prosentase realisasi anggaran Polres Tabalong sampai dengan tahun 2018 dengan pagu Rp. 44.227.092.000 dan serapan sebanyak Rp. 43.556.144.883 (98,48%) apabila dibandingkan dengan total

anggaran Tahun 2016 dengan pagu Rp. 39.060.211.000 dan serapan sebanyak Rp. 41.355.879.842 (105,88 %).

Langkah – langkah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan tahun 2017 - 2018 Polres Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Itwasda tentang temuan wasrik dari Itwasum maupun Itwasda;
  - b. Melakukan perbaikan tentang temuan wasrik;
  - c. Membuat rencana pendistribusian anggaran;
  - d. Membuat laporan realisasi anggaran;
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan KPPN wilayah setempat dalam pengelolaan anggaran;
  - f. Membuat rencana penarikan anggaran;
  - g. Membuat panel control kepada masing- masing pengguna anggaran.
2. Mengembangkan peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan personel dengan meningkatkan keikutsertaan pada pendidikan kejuruan dan pelaksanaan pelatihan fungsi.
- a. Terbangunnya postur personel Polres Tabalong yang profesional, kompeten, bermoral, modern.

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Prosentase jumlah personel Sat Lantas Polres Tabalong yang memiliki kompetensi**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Prosentase jumlah personel Polres Tabalong yang memiliki kompetensi			

  

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Jumlah personel Polres Tabalong yang memiliki kompetensi			

**Tabel 2**  
**Data personil Sat Lantas Polres Tabalong TA. 2018 yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan**

Data anggota Polri	Pendaftar	Lulus / tidak lulus	Ket
PERWIRA			
BINTARA			
PNS			

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah personel Polres Tabalong yang memiliki kompetensi sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 10 apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 sebanyak 11 dan tahun 2015 sebanyak 5.

Mengembangkan kegiatan keselamatan berlalu lintas dalam rangka mendukung program Decade Of Avtion For Safety 2011 – 2020.

- a. Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Prosentase penurunan pelanggaran lalulintas**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase penurunan pelanggaran lalulintas	15 %	69%	100%

Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018
Jumlah penurunan pelanggaran lalulintas	2.770	3.565	6.032

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Jumlah penurunan pelanggaran lalulintas pada Tahun 2018 sebanyak 6.032, dibandingkan dengan Tahun 2017 sebanyak 3.565 dan Tahun 2016 sebanyak 2.770.

**Tabel 2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Prosentase penurunan angka kematian korban laka lant**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase penurunan angka kematian korban laka lant	5 %	4%	80%

Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018
Jumlah penurunan angka kematian korban laka lant	42	54	38

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Jumlah penurunan angka kematian korban laka lant mengalami penurunan pada Tahun 2018 sebanyak 38 kejadian, dibandingkan dengan Tahun 2017 sebanyak 54 kejadian dan Tahun 2016 sebanyak 42 kejadian.



**Tabel 3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Prosentase penurunan kecelakaan lalu lintas**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase penurunan kecelakaan lalu lintas	2 %	1%	77%

  

Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018
Jumlah penurunan kecelakaan lalu lintas	74	71	40

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Jumlah penurunan kecelakaan lalu lintas pada Tahun 2018 sebanyak 40 kejadian, dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 71 kejadian dan tahun 2016 sebanyak 74 kejadian.

**Tabel 4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Prosentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas	10 %	7%	70%

  

Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018
Jumlah peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas	155	165	176

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa Jumlah peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas mengalami kenaikan pada Tahun 2018 sebanyak 176, dibandingkan dengan Tahun 2017 sebanyak 165 dan Tahun 2016 sebanyak 155.

**Tabel 5**  
**Tabel data lalu lintas Tahun 2018 Polres Tabalong**

No	Uraian	2016	2017	2018	
1	Jumlah pelanggaran lalu lintas	2.770	3.565	6.032	
2	Jumlah penurunan angka kematian korban laka lintas	42	54	38	
3	Jumlah penurunan kecelakaan lalu lintas	74	71	40	
4	Jumlah peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas	155	165	176	

**Tabel 6**  
**Tabel data lalu lintas tahun 2016 - 2018 Polres Tabalong**

No	Uraian	2015	2016	2017	
1	Prosentase pelanggaran lalu lintas	2.770	3.565	6.032	
2	Persentase titik rawan kemacetan lalu lintas	5	5	5	
3	Jumlah pengaturan di bidang lalu lintas	7.098	9.782	10.949	
4	Jumlah penjagaan di bidang lalu lintas	2.223	4.398	1.670	
5	Jumlah patroli di bidang lalu lintas	2.664	6.828	6.144	
6	Jumlah pengawalan di bidang lalu lintas	423	508	449	
7	Jumlah penegakan hukum di bidang lalu lintas (tilang)	2.770	3.565	6.032	
8	Jumlah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan prima penerbitan SIM	18.746	15.411	19.874	
9	Jumlah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan prima penerbitan STNK	R2: 17.962 R4: 3.682	R2 :19.362 R4 :3.548	R2 :19.578 R4 :3.789	

Langkah – langkah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas tahun 2016 - 2018 Polres Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Giat Rutin penjagaan yang makin Intensif pada jam – jam rawan pelanggaran;
- b. Pelaksanaan Giat Rutin patroli yang makin Intensif pada jam – jam rawan pelanggaran;
- c. Melakukan penegakkan hukum / razia pada daerah rawan pelanggaran;
- d. Pelaksanaan Giat Rutin penjagaan yang makin Intensif pada daerah rawan laka;
- e. Pelaksanaan Giat Rutin patroli yang makin Intensif pada jam – jam rawan laka;
- f. Melakukan pemasangan spanduk – spanduk himbauan;
- g. Melakukan anev kejadian laka;
- h. Meningkatkan kegiatan dikmas lantas;
- i. Meningkatkan kegiatan polisi sahabat anak.

8). Mengembangkan implementasi program prioritas Kapolri pada program meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan berbasis teknologi informasi.

- a). Terwujudnya pelayanan prima di wilayah hukum Polres Tabalong

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Prosentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan**  
**(SIM, STNK dan TNKB)**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan (SIM, STNK dan TNKB)	10 %	12%	100%

Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018
Jumlah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan (SIM, STNK dan TNKB)	R2: 17.962 R4: 3.682 SIM:18.746	R2: 17.962 R4: 3.682 SIM:15.411	R2: 17.962 R4: 3.682 SIM:19.874

Dari penjelasan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Jumlah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan (SIM, STNK dan TNKB) pada Tahun 2018 sebanyak 41.518, dibandingkan dengan Tahun 2017 sebanyak 37.055 dan pada Tahun 2016 sebanyak 40.390.

**Tabel 1**

**Indikator Kinerja Utama**  
**Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana umum sampai**  
**berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana umum sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	9 %	7%	67%

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Jumlah pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana umum sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	211	220	165

Dari penjelasan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Jumlah pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana umum sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) pada Tahun 2018 sebanyak 165 kasus, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 220 kasus dan tahun 2016 sebanyak 211.

**Tabel 2**

**Indikator Kinerja Utama**  
**Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana khusus sampai**  
**berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)**

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana khusus sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	9 %	71%	100%

<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Jumlah pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana khusus sampai berkas	14	7	12

perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)			
---	--	--	--

Dari penjelasan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Jumlah pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana khusus sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) sampai dengan bulan Maret Tahun 2018 sebanyak 12 kasus, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 7 kasus dan tahun 2016 sebanyak 14 kasus.

**Tabel 3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	8%	5%	58%

Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018
Jumlah pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	47	85	60

Dari penjelasan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Jumlah pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) pada Tahun 2018 sebanyak 60 kss, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 85 kasus sedangkan tahun 2016 sebanyak 47 kss.

**Tabel 4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana Korupsi sampai**  
**berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana Korupsi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	5%	3%	50%

Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018
Jumlah pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana Korupsi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	3	2	1

Dari penjelasan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Jumlah pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana Korupsi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) pada Tahun 2018 sebanyak 1 kasus, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 2 kasus dan Tahun 2016 sebanyak 3.

**Tabel 1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Prosentase MOU Polri dengan Instansi/ Lembaga terkait**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase MOU Polri dengan Instansi/ Lembaga terkait	8 %	100%	100%

Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018
Jumlah MOU Polri dengan Instansi/ Lembaga terkait	7	13	32

Dari penjelasan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Jumlah MOU Polri dengan Instansi/ Lembaga terkait pada Tahun 2018 sebanyak 32 kasus, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 13 kasus dan tahun 2016 sebanyak 7.

Langkah – langkah untuk mewujudkan jumlah MOU Polri dengan Instansi/ Lembaga terkait tahun 2017 - 2018 Polres Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan kemitraan dengan instansi terkait;
- b. Meningkatkan kerja sama disegala bidang baik dengan negeri maupun swasta;
- c. Mewujudkan terciptanya partisipasi seluruh masyarakat dalam harkamtibmas.

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini ada hal hal yang perlu dicermati yaitu secara keseluruhan penyerapan dari delapan program yang ada dengan perincian sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 28.247.418.000,- realisasi Rp. 27.638.967.162 ( 97,85 % ).
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri sebesar Rp. 6.306.850.000,- realisasi Rp. 6.244.353.721 ( 99,01% ).
3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabiitas aparatur polri sebesar Rp. 77.301.000,- realisasi Rp. 77.301.000 (100%).
4. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp. 1.322.964.000,- realisasi Rp. 1.322.964.000 (100%).
5. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan sebesar Rp. 2.051.937.000,- realisasi Rp. 2.051.937.000 (100%).
6. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp. 4.172.813.000,- realisasi Rp. 4.172.813.000 (100%).
7. Program Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebesar Rp. 2.047.809.000,- realisasi Rp. 2.047.809.000 (100%).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Tugas Pokok Sat Lantas Polres Tabalong**

- a. Melaksanakan kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- b. Memberikan reward terhadap personil yang telah dapat menyerap pagu sesuai ketentuan dan diberikan funisment berupa teguran kepada fungsi yang belum maksimal dalam penyerapan pagu yang telah ada, serta menjadi motto kedepan agar lebih baik dan sempurna.
- c. Lingkup pertanggung jawaban yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan ataupun keberhasilan.
- d. Hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban instansi yang diperlukan sebagai upaya tindak lanjut.
- e. Laporan yang ada harus lebih besar daripada biaya penyusunannya, dan laporan mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

#### **B. SARAN DAN TINDAK LANJUT**

1. Melanjutkan Program Reformasi Birokrasi Polri dengan mempertahankan dan meningkatkan mutu Pelayanan Polri yang prima kepada masyarakat sebagai wujud Quick Wins yang ditetapkan 4 (empat) target yaitu :
  - a) Quick Respons.
  - b) Transparansi pelayanan (SIM, STNK, STCK).
  - c) Transparansi proses penyidikan tindak pidana dengan menitik beratkan SP2HP ( surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan).
  - d) Transparansi dalam Rekrutmen Personel Polri.



2. Terus berupaya meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan yang ditampilkan secara tegas dan humanis untuk dapat dipercaya oleh masyarakat terhadap Polri (*trust building*).
3. Mengedepankan tindakan preventif dan preemtif
4. Memelihara kekompakan dan hubungan yang harmonis sesama anggota, dengan kesatuan samping dan dengan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Insansi Pemerintah (LKIP) Sat Lantas Polres Tabalong tahun anggaran 2018 sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

Tanjung, 01 Januari 2019  
KASAT LANTAS POLRES TABALONG

Ttd

M. NOOR CHAIDIR. S.H, S.I.K  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84081962